

ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI

Royyan Hafizi, Dede Nursamsy

Green Publisher

E-mail: royyanhafizi18@gmail.com, dedenursamsy28@gmail.com

Abstrak

Mengingat besarnya peran UMKM tersebut, maka pemerintah melalui instansi terkait terutama Kementerian Koperasi dan UKM telah meluncurkan berbagai program bantuan. Kebijakan pemerintah untuk mendorong usaha kecil dan menengah cukup serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Teknik analisis datanya analisis isi. Adapun strategi yang dirumuskan adalah: (1) Meningkatkan partisipasi kontributif anggota. (2) Meningkatkan pelayanan kepada anggota.

Kata Kunci: *Strategi pemerintah, Peningkatan kesejahteraan, Anggota koperasi*

Abstract

Given the large role of the MSMEs, the government through the relevant agencies, especially the Ministry of Cooperatives and SMEs, has launched various assistance programs. The government's policy to encourage small and medium enterprises is quite serious. This study aims to analyze the strategy of local governments in improving the welfare of cooperative members. This is a descriptive qualitative research. The method used is literature review. Data collection technique is through documentation. The data analysis technique is content analysis. The strategies formulated are: (1) Increasing the member's contributive participation. (2) Improving services to members.

Keywords: *Government strategy, Welfare improvement, Cooperative members*

Diterima: 25-06-2020 Direvisi: 5-07-2020 Disetujui: 6-07-2020

PENDAHULUAN

Lembaga koperasi diperkenalkan di Indonesia sudah diarahkan kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah (Tolong et al., 2020). Strata ini biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. Eksistensi koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya (Tolong et al., 2020). Lembaga koperasi oleh banyak kalangan dinilai sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan

	Royyan Hafizi, Dede Nursamsy. (2020). <i>Analisis Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi</i> . <i>Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi Kewirausahaan</i> Vol 11(2):76-83
How to cite:	
E-ISSN:	
Published by:	https://greenpublisher.id/

bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung muatan menolong diri sendiri, kerja sama untuk kepentingan bersama (gotong-royong), dan beberapa esensi moral lainnya (Wilujeng, 2020).

Koperasi merupakan wadah untuk bergabung dan berusaha bersama agar kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi, selain itu koperasi juga merupakan alat bagi golongan ekonomi lemah untuk dapat menolong dirinya sendiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan memperbaiki atau meningkatkan taraf hidupnya. Sampai saat ini koperasi menduduki tempat yang penting dalam sistem perekonomian, karena terbukti telah membawa perubahan dalam struktur ekonomi (Pathoni, 2012). Sistem adalah suatu jaringan kerja dari jaringan-jaringan yang selalu berhubungan, berkumpul bersama sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk suatu sasaran yang tertentu (Retnowati, 2015).

Koperasi menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia (Retnowati, 2015). Hal itu ditunjukkan pada ketegasan sikap pasal 33 UUD 1945 dan juga pada pasal 4 UU No.25/1992. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945, misalnya koperasi jelas-jelas dinyatakan sebagai bentuk perusahaan yang sesuai dengan sistem perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Sedangkan dalam pasal 4 UU No.25/1995, antara lain dikatakan bahwa fungsi koperasi adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. (Puspitawati & Dewi Anggadini, 2010)

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Wicaksono & Ariyani, 2013). Mengingat besarnya peran UMKM tersebut, maka pemerintah melalui instansi terkait terutama Kementerian Koperasi dan UKM telah meluncurkan berbagai program bantuan. Kebijakan pemerintah untuk mendorong usaha kecil dan menengah cukup serius. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menegaskan bahwa, usaha ini perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga analisis strategi pemerintah daerah melalui DPKUKM dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dianggap sangat diperlukan guna efektifitas kegiatan ekonomi di Cirebon. (Zahra Afifah & Hendra Setiawan, 2012).

METODE PENELITIAN

Ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Teknik analisis datanya analisis isi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil DPKUKM Kota Cirebon

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang melaksanakan urusan Perkoperasian, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, yang merupakan kegiatan ekonomi secara konkrit dengan upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan segenap potensi SDA dan SDM yang tersedia, dengan tidak menimbulkan terjadinya gangguan yang bersifat alam (ekosistem) maupun berdampak negatif terhadap sosial kemasyarakatan (Zahra Afifah & Hendra Setiawan, 2012).

Untuk mewujudkan pembangunan Cirebon ke depan yang dapat melibatkan peran serta partisipasi rakyat terutama dihadapkan situasi perekonomian dan politik yang kompleks sebagai dampak terjadinya multi krisis pemahaman dan pola usaha berbagai dimensi di masyarakat, maka perlu dilakukan optimalisasi peran Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Cirebon dalam kegiatan ekonomi secara nyata dan perlu dilakukan langkah dan kebijakan yang mengarah pada perbaikan taraf hidup rakyat (Kadarisman et al., 2016).

1. Visi dan Misi

a. Visi :

“Sehati Kita wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah” Makna yang terkandung dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 adalah :

- 1) Sehat memiliki makna : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat jasmani dan rohani.
- 2) Hijau memiliki makna : mewujudkan ruang publik, sarana dan prasarana umum yang ramah lingkungan serta mewujudkan keseimbangan dan kelestarian lingkungan.
- 3) Agamis memiliki makna : Meningkatkan dan menjaga kondusifitas kerukunan antar umat beragama.
- 4) Tenram memiliki makna : mewujudkan lingkungan masyarakat yang sadar hukum, tertib dan aman.
- 5) Inovatif memiliki makna : Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif yang berafiliasi pada program *smart city*.

b. Misi :

- 1) Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul dalam Segala Bidang.
- 2) Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, Akuntabel, berwibawa, dan Inovatif.
- 3) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Saran dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan.
- 4) Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Umum yang Kondusif.

2. Tugas pokok dan fungsi

Tugas Pokok Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perindustrian. Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perindustrian.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perindustrian.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta

perindustrian. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perindustrian.

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas pokok koperasi dan UKM

Tugas Pokok Koperasi dan UKM, membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan melaksanakan tugas dalam lingkup Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dipimpin oleh Kepala Bidang Koperasi & UKM. Terdapat 1 Seksi yaitu, Seksi Koperasi

a. Fungsi Kepala Bidang Koperasi dan usaha Kecil Menengah :

- 1) Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 2) Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasinal penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 3) Pelaksanaan tugas pokok Bidang Koperasi dan usaha Kecil Menengah
- 4) Pengordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 5) Pengordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 6) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya
- 7) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 8) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 9) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

Tugas Pokok Seksi Koperasi memebantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup Seksi Koperasi.

b. Fungsi Kepala Seksi Koperasi :

- 1) Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Koperasi
- 2) Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Koperasi
- 3) Pelaksanaan tugas pokok Seksi Koperasi
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Koperasi
- 5) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya
- 6) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Koperasi
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dina lingkup Seksi Koperasi Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

B. Indikator Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi

Kesejahteraan anggota koperasi dengan menggunakan pendekatan terhadap beberapa indikator, diantaranya kondisi rumah tangga dan ketenagakerjaan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, perumahan, sosial budaya dan kehidupan beragama. Adapun pengukuran kesejahteraan tiap-tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kependudukan

Indikator kependudukan digunakan untuk mengetahui gambaran keluarga petani mengenai jumlah anggota keluarga dan beban tanggungan dalam keluarga. Jumlah anggota keluarga dapat mencerminkan kondisi pengeluaran keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Bakhri, 2020).

2. Kesehatan

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan adalah kesehatan. Misalnya, tentang ada tidaknya keluhan tentang kesehatan, pengetahuan tentang pentingnya gizi dalam keluarga petani serta akses kepada fasilitas kesehatan yang tersedia (RES et al., 2016).

3. Pendidikan

Pendidikan adalah indikator yang dapat memberikan gambaran bagaimana keluarga terbebas dari buta huruf dan melaksanakan wajib belajar 9 tahun (Tambunan et al., 2020). Hal tersebut dapat diketahui dari kondisi anggota keluarga yang berusia 10 tahun ke atas dalam membaca dan menulis. Hal ini menandakan pembangunan pendidikan di daerah penelitian termasuk baik. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi anggota keluarga untuk mengadopsi teknologi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga petani. Petani menganggap pendidikan sangat penting terutama bagi anak-anak mereka.

4. Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan digunakan untuk mengetahui gambaran keluarga petani mengenai jumlah anggota keluarga yang bekerja dan lama waktu bekerja (Prasetio et al., 2020). Jumlah anggota keluarga yang bekerja dapat mencerminkan kondisi pendapatan yang akan diterima guna memenuhi kebutuhan pengeluaran rumah tangga sehari-hari.

5. Konsumsi

Konsumsi merupakan indikator yang memberikan gambaran tentang pola pengeluaran keluarga (Harahap, 2021). Pengeluaran merupakan data sebenarnya untuk melihat seluruh pendapatan yang diperoleh keluarga petani.

6. Perumahan

Kondisi perumahan petani respon juga dilihat dari jenis WC yang digunakan yaitu semua sudah menggunakan WC jongkok. Tempat pembuangan sampah sebagian besar keluarga petani anggota adalah lubang sampah. Kualitas perumahan akan mencerminkan tingkat pendapatan keluarga dan juga mempengaruhi kesejahteraan penghuninya. Semakin baik kualitasnya semakin tinggi kesejahteraannya (Bakhri, 2020).

C. Analisis Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Di Cirebon.

Pemerintah daerah melalui DPKUKM bidang Koperasi dalam Ekonomi Kerakyatan bisa dilihat dari penjabaran yang lebih terperinci mengenai Pengertian Koperasi di Indonesia. Pengertiannya adalah sebagai berikut :

1. Koperasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan diantara para anggotanya, Kebutuhan yang sama ini lalu diusahakan pemenuhnya melalui pembentukan perusahaan (Beni et al., 2017). Dengan adanya perusahaan yang dimiliki secara bersama-sama, maka diharapkan kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan cara yang lebih baik dibanding dengan dilakukan oleh masing-masing anggota secara perorangan.
2. Koperasi didirikan atas dasar kesadaran mengenai keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menyatukan diri demi kepentingan bersama yang lebih besar. Usaha itu dilandasi oleh suatu cita-cita yang luhur untuk menolong diri sendiri atas dasar keyakinan akan harga diri, kesadaran pribadi serta rasa setia kawan.
3. Koperasi didirikan atas dasar kesukarelaan dan keterbukaan, tidak boleh ada paksaan. Dengan adanya koperasi, maka rakyat kecil terbebas dari lintah darat yang memberi pinjaman dengan bunga tinggi. Selain itu, rakyat pedesaan terbebas dari tengkulak yang membeli hasil panen dengan harga rendah. Pada akhirnya, mereka bisa mengelola keuangan atau hasil panen secara gotong royong dan berdasar asas kekeluargaan (Pada et al., 2019).

Strategi Koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota yaitu :

1. Meningkatkan partisipasi kontributif anggota dengan cara memberikan pemahaman kepada anggota tentang pentingnya partisipasi dalam koperasi bagi dirinya sebagai anggota, transparan, jujur, terbuka, sedangkan untuk meningkatkan partisipasi insentif dengan cara menurunkan tingkat bunga dan pemberian hadiah lebaran.
2. Meningkatkan pelayanan kepada anggota, yakni dengan cara tidak memberikan syarat apa pun kepada anggota yang ingin meminjam, pelayanan bisa dilakukan selain di kantor, dan jika anggota ingin melunasi pinjaman lebih cepat dari perjanjian maka cukup mengembalikan sisa utang saja tanpa ada bunga.

Meningkatkan Modal Koperasi, yakni dengan cara menaikkan simpanan wajib anggota dan SHU yang diperoleh anggota tidak dibagikan namun di masukkan kedalam simpanan khusus SHU (Pada et al., 2019).

KESIMPULAN

Pemerintah daerah melalui DPKUKM bidang Koperasi melakukan strategi berikut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Adapun strategi yang dirumuskan adalah: (1) Meningkatkan partisipasi kontributif anggota dengan cara memberikan pemahaman kepada anggota tentang pentingnya partisipasi dalam koperasi bagi dirinya sebagai anggota, transparan, jujur, terbuka, sedangkan untuk meningkatkan partisipasi insentif dengan cara menurunkan tingkat bunga dan pemberian hadiah lebaran. (2) Meningkatkan pelayanan kepada anggota, yakni dengan cara tidak memberikan syarat apa pun kepada anggota yang ingin meminjam, pelayanan bisa

dilakukan selain di kantor, dan jika anggota ingin melunasi pinjaman lebih cepat dari perjanjian maka cukup mengembalikan sisa utang saja tanpa ada bunga. (Meningkatkan Modal Koperasi, yakni dengan cara menaikkan simpanan wajib anggota dan SHU yang diperoleh anggota tidak dibagikan namun di masukkan kedalam simpanan khusus SHU.

BIBLIOGRAFI

- Bakhri, S. (2020). Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil Dan Menengah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 54. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6789>
- Beni, S., Rano, G., & Tipo, C. U. L. (2017). Credit Union sebagai penggerak ekonomi masyarakat dayak Kalimantan Barat. *Pros. Int. Congr. I Dayak Cult*, 1, 168–177.
- Harahap, A. S. (2021). *Pengaruh Pendapatan, Jumlah Anggota Keluarga Dan Pendidikan Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Sugai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Kadarisman, M., Gunawan, A., & Ismiyati, I. (2016). Kebijakan Manajemen Transportasi darat dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat di Kota Depok. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 3(1), 41–58.
- Pada, S., Koperasi, D., & Muna, K. (2019). *Kesejahteraan Anggota Koperasi*. 2(3), 10–20.
- Pathoni, A. (2012). *Peran koperasi peternak sapi Bandung Utara terhadap perubahan sosial ekonomi anggotanya: Penelitian terhadap koperasi peternak susu Bandung Utara di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Prasetyo, D. E., Widjaya, S., & Murniati, K. (2020). Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Petani Padi Sawah Di Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 8(3), 403–410.
- Puspitawati, L., & Dewi Anggadini, S. (2010). *Sistem informasi akuntansi*.
- RES, A. A., Widjaya, S., & Kalsum, U. (2016). Pendapatan dan kesejahteraan anggota KSP Tani Makmur Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 4(2).
- Retnowati, D. (2015). Strategi pengembangan kelembagaan dan koperasi melalui sistem demokrasi di Indonesia. *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)*, 1(6).
- Tambunan, A. T., Revida, E., & Rujiman, R. (2020). Partisipasi Pemuda Dalam Meningkatkan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Bagi Masyarakat Kelurahan Denai Kota Medan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 39–63.
- Tolong, A., As, H., & Rahayu, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Suka Damai. *Jambura Economic Education Journal*, 2(1), 25–33.
- Wicaksono, A., & Ariyani, W. (2013). Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Industri Rokok Di Kudus. *Jurnal Sosial Budaya*, 6(2), 29–39.
- Wilujeng, S. R. (2020). *Konsep Koperasi Taqiyyuddin Al-Nabhani Dalam Perspektif Hukum Islam*. IAIN Ponorogo.
- Zahra Afifah, R., & Hendra Setiawan, A. (2012). Analisis Bantuan Modal dan Kredit Bagi Kelompok Pelaku Usaha Mikro Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota

Semarang (Studi Kasus : KPUM di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah.
In *Diponegoro Journal Of Economic* (Vol. 1, Issue 1).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
